

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Perumusan Masalah
- 1.3. Batasan Masalah
- 1.4. Keaslian Penelitian
- 1.5. Manfaat Penelitian
- 1.6. Tujuan Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Perumusan Masalah
- 1.3. Batasan Masalah
- 1.4. Keaslian Penelitian
- 1.5. Manfaat Penelitian
- 1.6. Tujuan Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Perumusan Masalah
- 1.3. Batasan Masalah
- 1.4. Keaslian Penelitian
- 1.5. Manfaat Penelitian
- 1.6. Tujuan Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Perumusan Masalah
- 1.3. Batasan Masalah
- 1.4. Keaslian Penelitian
- 1.5. Manfaat Penelitian
- 1.6. Tujuan Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, keaslian penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

1.1. Latar Belakang

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik memicu timbulnya gejolak yang berakar pada ketidakpuasan. Tuntutan yang semakin tinggi diajukan terhadap pertanggungjawaban yang diberikan oleh penyelenggara negara atas kepercayaan yang diamanatkan kepada mereka. Dengan kata lain, kinerja instansi pemerintah kini lebih banyak mendapat sorotan, karena masyarakat mulai mempertanyakan manfaat yang mereka peroleh atas pelayanan instansi pemerintah (Mahsun et.al, 2015).

Sebagai respon pemerintah terhadap tingginya tuntutan masyarakat, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 10 ayat (2) Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada Pemerintah Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyajikan laporan keuangan berbasis akrual pada tahun 2015. Dalam rangka peningkatan kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah dan untuk menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih baik, serta memfasilitasi manajemen keuangan/aset yang lebih transparan dan akuntabel, maka perlu penerapan akuntansi berbasis akrual yang merupakan *best practice* di dunia internasional.

Pengukuran kinerja merupakan suatu aktivitas penilaian pencapaian target-target tertentu yang diderivasi dari tujuan strategis organisasi. Jadi pengukuran kinerja harus berbasis pada strategi organisasi. Pemilihan indikator dan ukuran kinerja dan penetapan target untuk setiap ukuran merupakan upaya konkret dalam memformulasikan tujuan strategis organisasi sehingga lebih berwujud dan terukur. Indikator dan ukuran kinerja finansial dan nonfinansial untuk target-target operasional tertentu memberikan garis pedoman (*guide-lines*) bagi manajemen menengah dan bawah. Hasil aktual yang dicapai untuk setiap indikator dan ukuran kinerja, menunjukkan tingkat ketercapaian manajemen atas strategi yang dipilih. *Review* hasil aktual dengan ukuran kinerja yang ditetapkan memberikan masukan untuk diambilnya tindakan korektif untuk perbaikan dan peningkatan kinerja selanjutnya (*feedback*).

Pengukuran kinerja juga harus didasarkan pada karakteristik operasional organisasi. Hal ini terutama diperlukan untuk mendefinisikan indikator dan ukuran kinerja yang digunakan. Organisasi dengan karakteristik operasional yang berbeda membutuhkan ukuran kinerja yang berbeda pula. Suatu ukuran kinerja didasarkan atas kuantifikasi tingkat efisiensi dan efektivitas suatu pelaksanaan kegiatan. Selain itu, dengan indikator dan ukuran kinerja yang sesuai dengan jenis kegiatan organisasi maka pengukuran kinerja dapat digunakan sebagai dasar melakukan perubahan, penghapusan dan perbaikan sehingga hasil operasi organisasi mampu mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan (Mahsun et.al, 2015).

Transparansi memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan transparansi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Transparansi juga berarti adanya penjelasan manajemen organisasi sektor publik tentang aktivitas, program dan kebijakan yang sudah, sedang, dan akan dilakukan beserta sumber daya yang digunakannya. Sebagai upaya mewujudkan transparansi publik, akuntansi sektor publik berperan dalam pemberian keterbukaan informasi keuangan beserta penjelasannya dalam bentuk Catatan Atas Laporan Keuangan (Mahmudi, 2011).

Akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah daerah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus bisa menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik, yaitu hak untuk tahu (*right to know*), hak untuk diberi informasi (*right to be informed*), dan hak untuk didengar aspirasinya (*right to be heard and to be listening to*) (Mardiasmo, 2002).

Dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas yang pada akhirnya menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih baik, maka organisasi publik harus didukung dengan sumber daya manusia yang memiliki kualitas yang baik untuk menghasilkan informasi keuangan yang andal dan tepat waktu sehingga hak-hak publik dapat terpenuhi dan pemerintah sebagai subjek pemberi informasi dapat memenuhi tanggungjawabnya.

Sumber daya manusia atau *human resources* mengandung dua pengertian. Pertama, sumber daya manusia (SDM) mengandung pengertian usaha kerja atau

jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. Dalam hal ini SDM mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa.

Pengertian kedua dari SDM menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan usaha atau kerja tersebut. Mampu bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang menghasilkan nilai ekonomis, yaitu bahwa kegiatan tersebut menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pemanfaatan teknologi informasi juga merupakan faktor penting yang mempengaruhi keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan. Hasil penelitian Zuliarti (2012) menyebutkan bahwa, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif Terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola Keuangan Daerah, dan menyalurkan Keuangan Daerah kepada pelayanan publik agar proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dapat terselenggara.

Menurut Martin (1999) teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer (perangkat keras atau perangkat lunak) yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi. Teknologi informasi memiliki peranan penting untuk mencapai keunggulan kompetitif bagi organisasi.

Pemerintah Daerah tidak hanya diwajibkan untuk memanfaatkan kemajuan teknologi, pengendalian internal juga mutlak diperlukan. Mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Pemerintah dalam rangka mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan Terhadap peraturan perundang-undangan.

Pengendalian Intern Bidang Akuntansi, meliputi rencana organisasi dan prosedur serta catatan-catatan yang berhubungan dengan pengamanan harta/aktiva dan dapat dipercayainya catatan keuangan dan dirancang untuk meyakinkan:

- (a) Transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan persetujuan/wewenang manajemen, baik bersifat umum atau khusus.
- (b) Transaksi dicatat agar memudahkan:
 - b.1 penyiapan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi atau kriteria lain yang sesuai dengan tujuan laporan tersebut.
 - b.2 mengadakan pertanggungjawaban atas aktiva.

(c) Penggunaan atas aktiva diberikan hanya dengan persetujuan manajemen.

(d) Jumlah aktiva seperti yang ada pada laporan/catatan perusahaan dibandingkan dengan aktiva yang ada dan bila terjadi perbedaan dilakukan dengan tindakan yang tepat.

Ariesta (2013) menemukan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan Terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif signifikan Terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan Terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian Roshanti et.al, (2014) menemukan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan Terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif signifikan Terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan Terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan Terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan Roshanti et.al, (2014) menemukan adanya hubungan antara sistem pengendalian intern dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan, dimana dalam penelitian terdahulu belum terdapat pengembangan

hipotesis mengenai hubungan pengendalian intern dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini akan meneliti hubungan antara kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi Terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah dengan mengambil judul:

PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PENGENDALIAN INTERN AKUNTANSI TERHADAP NILAI INFORMASI PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Sleman)”.

1.2. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan pokok permasalahannya, yaitu :

- 1) Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah?
- 2) Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah?
- 3) Apakah pengendalian intern akuntansi berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah?
- 4) Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah?

- 5) Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah?
- 6) Apakah pengendalian intern akuntansi berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah?
- 7) Pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah?
- 8) Pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah?

1.3. Batasan Masalah

Untuk mempermudah penulisan laporan skripsi ini agar lebih terarah dan berjalan dengan baik, maka perlu kiranya dibuat suatu batasan masalah. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan laporan skripsi ini, yaitu:

- Waktu penelitian : Tanggal 06 Desember 2016 s/d tanggal 30 Desember 2016.
- Tempat penelitian : Kabupaten Sleman
- Objek Penelitian : SKPD di Kabupaten Sleman
- Dengan kriteria responden sebagai berikut:
 1. Para pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi/tata usaha keuangan pada SKPD.

2. Responden dalam penelitian ini adalah kepala dan staf subbagian akuntansi/penatausahaan keuangan, sehingga tiap SKPD ditetapkan secara *cluster sampling* sebanyak 3 orang yang menjadi responden.
3. Responden ditetapkan pada kepala bagian, staf pencatatan keuangan/akuntansi dan staf pemegang kas SKPD.

1.4. Keaslian Penelitian

Sepengetahuan penulis, penelitian tentang pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi Terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah belum pernah dilakukan di Kabupaten Sleman.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dalam memperbaiki kualitas nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah melalui kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi sehingga tujuan pemerintahan dapat tercapai.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mahasiswa dalam berpikir dan menjadi bahan informasi bagi pihak yang berkepentingan serta menambah literatur perpustakaan sehingga dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

1.6. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris :

- 1) Pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sleman.
- 2) Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sleman.
- 3) Pengaruh pengendalian intern akuntansi terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sleman.
- 4) Pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sleman.
- 5) Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sleman.
- 6) Pengaruh pengendalian intern akuntansi terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sleman.
- 7) Pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sleman.
- 8) Pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sleman.

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dibagi dalam tiga bab yang diuraikan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, keaslian penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis

Berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu, dan pengembangan hipotesis.

BAB III : Metode penelitian

Menguraikan tentang variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini akan diuraikan tentang deskripsi objek penelitian, analisis, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V : Penutup

Sebagai bab terakhir dari penelitian ini akan diuraikan kesimpulan yang merupakan penyajian singkat apa yang diperoleh dalam pembahasan. Dalam bab ini juga dimuat saran-saran dan batasan berdasarkan hasil penelitian.